

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada masa modern sekarang ini, akuntansi sektor publik terus berkembang sebagai sebuah alat pengawasan dan pelaporan dalam rangka akuntabilitas publik. Teknik-teknik berkembang mengikuti perkembangan organisasi pemerintahan, seperti adanya mazhab *New Public Management* yang lebih menuntut pertanggungjawaban kinerja.

Reformasi di banyak negara khususnya di Indonesia, juga memberikan dampak signifikan dalam perkembangan akuntansi sektor publik. Tuntutan agar pemerintah dikelola secara profesional dan efisien membuka kesadaran bagi setiap orang, terutama aparat pemerintah untuk senantiasa tanggap akan tuntutan lingkungannya dengan berupaya memberikan pelayanan terbaik secara transparan dan berakuntabilitas.

Dari aspek pencatatan, pemerintah Indonesia sebenarnya telah melakukan pencatatan atas keuangan negara mengikuti tata cara yang dikenalkan oleh pemerintah Hindia Belanda. Namun, teknik yang digunakan masih mengacu pada sistem kameral yang berorientasi pada pengendalian kas belaka. Sistem pengendalian juga tidak berkembang sehingga tidak tercipta akuntabilitas yang baik. Reformasi Keuangan Negara, yang ditandai dengan lahirnya Undang-Undang 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, lebih cepat mendorong perkembangan akuntansi sektor publik, tidak hanya pada pengembangan standar akuntansi yang lebih baku, tetapi juga pada pengembangan teknik dan sistem yang lebih andal.

Terbitnya UU paket Keuangan Negara yaitu Undang-Undang No 17 tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan Undang-Undang nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara, maka sebagai konsekuensinya adalah penyesuaian dan amandemen atas peraturan perundangan sebelumnya. Peraturan perundangan dalam kaitan pemerintahan dan pengelolaan keuangan daerah diterbitkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perbandingan Keuangan Daerah sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999.

Berdasarkan UU No 17 tahun 2003 dan UU No 1 tahun 2004 mengamanatkan untuk membentuk Komite Standar Akuntansi Pemerintah (KSAP) bertugas menyusun Standar Akuntansi Pemerintah. Hasil kerjanya adalah tentang PP No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah dengan prinsip apakah manfaat basis kas ke basis

akrual. Selanjutnya KSAP melakukan pengkajian terhadap PP No. 24 tahun 2005, kemudian hasilnya adalah PP No. 71 Tahun 2010 sebagai Standar Akuntansi Berbasis Akrual.

Fenomena yang dapat diamati dalam perkembangan sektor publik saat ini adalah semakin menguatnya tuntutan pelaksanaan akuntabilitas publik oleh organisasi sektor publik seperti pemerintah pusat dan daerah, unit-unit kerja pemerintah, departemen dan lembaga-lembaga negara. Tuntutan akuntabilitas sektor publik terkait dengan perlunya dilakukan transparansi dan pemberian informasi kepada publik dalam rangka pemenuhan hak-hak public.

Akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.

Permasalahan mengenai kualitas laporan keuangan ini semakin hangat untuk diperbincangkan, banyaknya kasus-kasus dan buruknya kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yang perlu dikaji lebih dalam. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dalam penyusunan Laporan Keuangan tersebut.

Adanya otonomi daerah menuntut secara tidak langsung pemerintah daerah untuk menyajikan Laporan Keuangan secara transparan dan tepat. Pemerintah daerah diwajibkan bertanggungjawab dan terbuka kepada masyarakat dalam penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Instansi Pemerintah wajib melakukan pengelolaan keuangan serta mempertanggungjawabkan pelaksanaan keuangannya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang didasarkan pada perencanaan strategis yang telah ditetapkan. Bentuk pertanggungjawaban tersebut diperlukan penerapan sistem pelaporan keuangan yang tepat, jelas, dan terukur sesuai dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Tuntutan yang semakin besar terhadap pelaksanaan akuntabilitas publik untuk memberikan informasi kepada publik, salah satunya adalah informasi akuntansi yang berupa laporan keuangan.

Laporan keuangan daerah pada dasarnya merupakan suatu asersi atau pernyataan dari pihak manajemen pemerintah daerah kepada pihak lain, yaitu pemangku kepentingan yang ada tentang kondisi keuangan pemerintah daerah. Agar dapat menyediakan informasi yang berguna dan bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan, maka informasi yang

disajikan dalam pelaporan keuangan harus memenuhi karakteristik kualitatif sehingga dapat digunakan dalam pengambilan keputusan. Karakteristik kualitatif informasi dalam laporan keuangan dapat dipenuhi dengan laporan yang disajikan secara wajar berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Oleh karena itu, perlu dilakukan pemeriksaan atas laporan keuangan yang dimaksudkan untuk menilai kewajaran laporan keuangan berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

Meskipun seperangkat perundangan dan peraturan mengenai pengelolaan keuangan telah memadai, pelaksanaan pengelolaan keuangan negara tersebut masih rentan terhadap penyimpangan dan penyalahgunaan uang publik. Penerapan sistem keuangan pada prakteknya tidak terlepas dari persepsi, wawasan, dan profesionalisme dari aparatur pemerintahnya itu sendiri. Hal ini berimplikasi terhadap kualitas laporan keuangan yang dibuat oleh satuan kerja pemerintah.

Dari hasil pemaparan yang terkait dengan fenomena yang dialami oleh pemerintah Kabupaten Labuhanbatu untuk melihat adanya hubungan antara penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah maka peneliti bermaksud untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah (Studi pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu)”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan diatas, maka dapat diidentifikasi masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Pengelolaan keuangan dan anggaran belanja masih belum sesuai dengan pagu anggaran yang ditetapkan dan bermasalah.
2. Pengelolaan aset daerah masih belum sesuai dengan standar akuntansi pemerintah.
3. Konstruksi pengerjaan proyek pembangunan gedung masih bermasalah.

C. Pembatasan Masalah

Melihat identifikasi masalah di atas dan disesuaikan dengan beberapa faktor antara lain faktor biaya, keterbatasan waktu penelitian dan kemampuan peneliti, maka peneliti membatasi penelitian ini pada pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Labuhanbatu.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka permasalahan yang akan diteliti oleh penulis adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah penerapan Standar Akuntansi Pemerintah dalam laporan keuangan Pemkab Labuhanbatu ?
2. Bagaimanakah pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintahan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah Kabupaten Labuhanbatu ?

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian

a. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, adapun tujuan dari hasil penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui bagaimana penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap kualitas laporan keuangan di pemerintah Kabupaten Labuhanbatu.
2. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintahan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah Kabupaten Labuhanbatu

b. Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan manfaat, antara lain :

a. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu akuntansi khususnya ilmu akuntansi sektor publik, penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai masukan dalam mata kuliah yang bersangkutan yaitu akuntansi sektor publik.

b. Secara Praktis

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat menghimpun informasi sebagai bahan sumbangan pemikiran bagi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu untuk dijadikan masukan dan pertimbangan bagi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu guna meningkatkan kinerja dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah.